

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Ashri, M. 2018. *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Anwar, U., & Rahmawati, S. (2023). *Politik Hukum dan Pemasarakatan: Kebijakan, Tata Laksana, dan Solusi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Cahya, M.R.F. dkk (2023). *Gizi & Penyakit Kronis*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- El-Muhtaj, M. 2017. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Eryansyah, A.M. (2021). *Hakikat Sistem Pemasarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan (Perspektif Hak Asasi Manusia)*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Hamja. (2015). *Pemberdayaan Lembaga Pemasarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hasnidar dkk (2020). *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Jannah, I. F., dkk. (2023). *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: PT. Scifintech Andrew Wijaya.
- Monica, R. D. dkk (2024). *Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Sumatera Barat: CV. Gita Lentera.
- Mufty, A. M. (2025). *Transformasi Sistem Pemasarakatan Pengganti Kopenjaraan di Indonesia*. Jakarta: PT. Adab Indonesia
- Musdalipah, dkk. (2024). *Pengantar Epidemiologi*. Yogyakarta: Penerbit Widina.
- Muslimin, D. dkk (2023). *Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat* (Edisi 1, Cet. 1). Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Noor, N. N., & Arsin, A. A. (2023). *Epidemiologi Dasar: Disiplin Dalam Kesehatan Masyarakat*. Makassar: Unhas Press.
- Nurul Qamar. (2016). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pradana, A. A. dkk (2021). *Epidemiologi Penyakit Menular: Pengantar Bagi Mahasiswa Kesehatan* (Ed. 1, Cet. 1). Depok: PT Raja Grafindo Persada.

- Rachmat, R. H. H. (2018). *Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Rifa'i, I. J. dkk (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian (Cet. I)*. Bojonegoro: Penerbit KBM Indonesia.
- Subroto, M., Rohayati, A. C., Santoso, I., & Warih, W. C. (2024). *Administrasi Pemasyarakatan I*. Yogyakarta: Deepublish Digital.
- Suhadi, S. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: CV. Sarnu Untung.
- Suratman, Dillah, H.P. (2015) *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Surianto, A. (2018). *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan: Modal Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing*. Yogyakarta: SAH MEDIA.
- Waluyo, B. (2023). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Zulfa, A.E., Akbari, R.A. Samad, I.Z. (2017) *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Artikel dan Jurnal

- Afriyanto, R. dkk (2024). Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf. *Unizar Law Review*, 7(2)
- Agustini, K. R. & Saputra, K. E. D. & Dwiyantri, I. I. D. A. (2023). Problematika Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*. 2(2)
- Andini, F., D. & Suhartini, E., & Ilyanawati, Y., A. (2025). Kepastian Hukum Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Usia Lanjut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Causa*, 13 (2)

- Astuti, N.K.N., & Mangku, D.G.S., & Yulianti, N.P.R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *e-Journal Komunitas Yustisia*, 3(1)
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1)
- Biaggy, F., & Wibowo, P. (2020). Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2)
- Darwin, I. P. J. (2019). Implikasi Overcapacity Terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Cepalo: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2)
- Dewi, M.D.R., & Mangku, D.G.S., & Yulianti, N.P.R. (2023). Implementasi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lapas Kelas II A Kerobokan. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4)
- Ginting, M., & Daeli, W., & Suryadi, B. (2021). Hubungan Voluntary Counseling and Testing (VCT) dengan Tingkat Depresi pada Penderita HIV/AIDS. *Dohara Publisher Open Access Journal*, 1(3)
- Ilham, A. R. (2020). Sejarah dan Perkembangan Konsep Kepingkaran Menjadi Pemasyarakatan. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(1)
- Krisnan, J., & Basri, B. (2023). Akibat Hukum Warga Binaan Lansia Ketika Tidak Mampu Melaksanakan Program Pembinaan Pemasyarakatan. *Borobudur Law and Society Journal*, 3(1)
- Mangku, D.G.S. (2021). *Legal Protection for Women and Children with Disabilities in Indonesia*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10 (1)
- Mangku, D.G.S. (2021). *Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949*. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1)
- Mangku, D.G.S., & Rai Yulianti, N.P., & Lasmawan, I.W. (2022) *Legal Protection for People with Disabilities in Indonesia in the Perspective of Justice Theory*. *Unnes Law Journal*, 8 (2)

- Nasip, & Yuliartini, N.P.R., & Mangku, D.G.S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(2)
- Pande, S.H.N.L.P., & Yuliartini, N.P.R., & Mangku, D.G.S. (2022). Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf (C) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Residivis Kasus Pencurian di Kabupaten Buleleng. *e-Journal Komunikasi Yustisia*, 5(2)
- Pintabar, A. J., & Rafinti, F., & Saragih, Y. M. (2024). Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. *USM Law Review*, 7(1).
- Prakosa, A. D., & Subroto, M. (2023). Pelaksanaan Perawatan Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bentuk Implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(2)
- Purwanto, K. A. T., Yuliartini, N.P.R., Mangku, D.G.S. (2019). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi dan Korban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2)
- Rahman, M. A. M., & Wijaya, T. S. (2021). Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana (Studi di Lapas Kelas IIA Curup). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2)
- Rahmat, D. dkk (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum*, 3(2)
- Randang, I. I. E. (2018). Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat Menurut KUHAP. *Lex Crimen*, 7(3)
- Rani, T. S. & Angkasa & Hendriana, R. (2019). Pembinaan Terhadap Narapidana Penderita HIV (Human Immunodeficiency Virus)/AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Penularan Terhadap Narapidana Lainnya (Studi Di Lapas IIA Purwokerto). *Soedirman Law Review*, 1(1)

- Rotinsulu, S., & Rimbing, N., & Elias, R., F. (2023). Tinjauan Yuridis Hak-Hak Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, 12 (2)
- Saputra, S. N. E., & Isnawati, M. (2022). Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam system pemidanaan di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 6(1)
- Saragih, S. J. (2021). Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana yang Menderita Penyakit Kronis. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(3)
- Setiawati, M., & Subroto, M. (2021). Pemenuhan Gizi Berdasarkan AKG Bagi Anak di Lapas Mengenai Hak Mendapatkan Makanan yang Layak. *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, 5(1)
- Sianturi, S., R. dkk (2024). Implementasi Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 5(1)
- Suandita, I.G.E., & Mangku, D.G.S., & Yulianti, N.P.R. (2023). Pengaturan Hukum Terkait Hak dan Kewajiban Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi. *e-Journal Komunikasi Yustisia*, 6(1)
- Subadra, I.K., & Mangku, D.G.S., & Yulianti, N.P.R. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait Pembinaan Kepribadian Terhadap Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3)
- Swastati, L., W. (2017). Pengenalan Penyakit Pada Manusia Berbasis Android Menggunakan Metode Sequential Search. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 1(1)
- Telaumbanua, R., F. (2020). Peran Tenaga Kesehatan dalam Melaksanakan Pelayanan Kesehatan WBP Rutan. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 11(1)
- Widyatama, Y. & Wibowo, P. (2021). Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Klaten Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(3)

Zebua, I. K. & Daulay, H. & Madya, F. (2024). Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1)

Artikel dalam Internet

World Health Organization. (2024, 23 Desember). Noncommunicable Diseases. diakses pada tanggal 01 Juli 2025 dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases>.

Skripsi:

Rahmatullah. (2023). *Penerapan Pasal 9 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Terkait Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak Di Lapas Kelas IIB Singaraja*. Skripsi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha

Wulandari, D. C. (2020). *Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba Dalam Pelayanan Kesehatan Narapidana Penderita HIV dan AIDS*. Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811 Tahun 2022)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan